

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal tahun 2025 Amerika Serikat secara sepihak memilih untuk menarik diri dari WHO.¹ Selama ini hubungan Amerika Serikat dengan lembaga kesehatan dunia tersebut amatlah baik dan terjalin berbagai kerja sama yang menguntungkan. Hubungan Amerika Serikat dengan WHO sudah ada di awal pembentukan WHO pada tahun 1948 bahkan Amerika Serikat menjadi negara inisiator dalam pembentukannya. Di era Presiden Truman ini WHO sebagai alat kepentingan nasional atau instrumen kebijakan bagi Amerika Serikat dalam promosi kesehatan global di tengah perang dingin.² Tiga puluh tahun kemudian tepatnya di era pemerintahan Presiden Ronald Reagan 1980 hingga 2000 hubungan Amerika Serikat dengan WHO kian surut karena Reagan skeptis terhadap kerjasama multilateral saat itu. Namun keadaan ini mulai membaik di era pemerintahan George W Bush dengan sikapnya yang pragmatis terhadap kerjasama multilateral.

Sejak beroperasi pada 7 April 1948, WHO mendapat dukungan finansial dari dua sumber pendanaan yaitu dana kontribusi/negara anggota/kontribusi yang dinilai (*assessed contributions*) dan dana sumbangan sukarela dari negara anggota atau dana yayasan (*voluntary contributions*).³ Dalam hal ini Amerika Serikat hadir

¹ Betsy Klein, "Trump Announces US Withdrawal from World Health Organization," CNN, January 22, 2025, diakses pada 23 Mei 2025, <https://edition.cnn.com/2025/01/21/politics/trump-executive-action-world-health-organization-withdrawal>

² Mingst, K. A., & Karns, M. P. (1990). The United States and the World Health Organization. *The United States and multilateral institutions: patterns of changing instrumentality and influence*, 140-141

³ "How WHO is funded," World Health Organization, diakses pada 23 Mei 2025, <https://www.who.int/about/funding>

sebagai negara yang paling besar kontribusinya. Terhitung dari 2022 hingga 2023 Amerika Serikat mengklaim dana yang sudah dikucurkan ke WHO mencapai US\$1,284 miliar baik dalam bentuk kontribusi yang dinilai ataupun sukarela.⁴ Konsistensi Amerika Serikat untuk loyal ke WHO tidak hanya dalam pendanaan namun juga partisipasi kerja sama. Hal ini sudah dimulai pra-pemerintahan Trump, dibuktikan dengan keterlibatan aktif Amerika Serikat dalam menangani penyakit global serta dalam menyusun pedoman kesehatan.

Di era George W. Bush kolaborasi terkuat WHO dengan Amerika Serikat dibuktikan dengan hadirnya *Presiden's Emergency Plan for AIDS Relief* (PEPFAR).⁵ Rencana Presiden ini merupakan program Presiden Bush dalam menangani kasus AIDS darurat di tahun 2003. Keberhasilan program ini ditandai oleh lahirnya 2 juta bayi bebas HIV dari ibu yang terjangkit pada tahun 2017.⁶ Sebagai bentuk konsistensi bantuan Amerika Serikat kepada WHO terlihat dari dukungan Bush yang terus mendanai program PEPFAR bahkan mencapai US\$15 miliar selama masa kepemimpinannya.⁷

Pada saat itu Bush sangat yakin dengan program kerjasama PEPFAR. HIV/AIDS tidak hanya terselesaikan di Ohio, namun juga menjadi warisan kepemimpinannya bagi dunia khususnya di Afrika. Keberhasilan PEPFAR menjadi titik awal semangat kerjasama Amerika Serikat dengan WHO, hubungan

⁴ “United States of America Partner in global health,” World Health Organization, diakses pada 23 Mei 2025, <https://www.who.int/about/funding/contributors/usa>

⁵ Gray, L. D. (2017). The US President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR): a comparative analysis of USA presidents' policy towards Africa. *African Renaissance*, 14(1-2), 17-37

⁶ Gray, L. D. (2017). The US President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR): a comparative analysis of USA presidents' policy towards Africa. *African Renaissance*, 14(1-2), 17-37

⁷ Gray, L. D. (2017). The US President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR): a comparative analysis of USA presidents' policy towards Africa. *African Renaissance*, 14(1-2), 17-37

ini pun diharapkan semakin kuat pada pemerintahan Amerika Serikat Selanjutnya.⁸

Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama Amerika Serikat masih memainkan perannya di WHO. Pemerintahan Obama membentuk *Global Health initiative* (GHI), yang artinya program ini bersifat lintas batas negara dan berfokus pada koordinasi serta keterlibatan multilateral. Program ini menjadi alat bagi Obama untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat semakin memimpin dalam hal isu kesehatan dunia maupun keanggotaannya di WHO.

Global Health Initiative merupakan strategi penanganan isu kesehatan dunia yang berfokus untuk meningkatkan sistem kesehatan di negara-negara miskin. Program ini bersifat multilateral sehingga Amerika Serikat bekerja sama dengan lembaga global lain seperti Global Fund, Global Alliance For Vaccines and Immunisations, dan tentunya WHO.⁹ GHI tidak hanya mengatasi wabah HIV/AIDS seperti halnya program PEPFAR namun juga menangani isu kesehatan lain seperti malnutrisi, keluarga berencana, menjaga kesehatan ibu & anak, dan HIV/AIDS di negara berkembang¹⁰.

Dilihat dari perkembangannya keberadaan Amerika Serikat di WHO tidak hanya semata mata sebagai anggota aktif melainkan juga sebagai cara Amerika Serikat untuk memperkuat posisinya di dunia internasional. Keterlibatan Amerika Serikat dengan WHO memberikan informasi tentang penyebaran

⁸ Gray, L. D. (2017). The US President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR): a comparative analysis of USA presidents' policy towards Africa. *African Renaissance*, 14(1-2), 17-37.

⁹ Gostin, L. O., & Mok, E. A. (2010). The president's global health initiative. *JAMA*, 304(7), 789-790.

¹⁰ Gostin, L. O., & Mok, E. A. (2010). The president's global health initiative. *JAMA*, 304(7), 789-790.

patogen transnasional, informasi penyebaran ini menjadi sistem peringatan bagi populasi Amerika Serikat sehingga mereka terlindungi dari patogen baru.¹¹ Selain itu perkembangan perusahaan dan kemajuan ilmu farmasi Amerika Serikat juga bergantung pada WHO. Misalnya pada vaksinasi influenza tahunan yang didasarkan pada akses sampel virus yang dimiliki WHO, yang mana penelitian kolaboratif ini dilakukan dibawah koordinasi WHO.¹²

Meskipun sudah memberikan sikap loyal dan kontribusi yang besar sebagai anggota WHO, tidak kecil kemungkinan Amerika Serikat untuk menarik keanggotaanya. Hal ini terealisasi ketika calon presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memimpin negeri Paman Sam di awal tahun 2025. Trump berhasil meraih total suara elektoral sebanyak 277 dari 538 suara yang ada sehingga.¹³ Dengan demikian Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya dan akan dilantik pada 20 Januari 2025 sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-47.¹⁴

Beberapa jam setelah dilantik Trump menandatangani perintah eksekutif (*executive order*) untuk menarik Amerika Serikat keluar WHO. Dalam keterangan resmi *the White House* yaitu pada bagian *Presidential Action* dinyatakan bahwa perintah eksekutif 13987 yang mengatur pemerintah Amerika Serikat dalam

¹¹ Gostin, L. O., Meier, B. M., & Pace, L. (2025). A world without WHO—a crossroads for US global health leadership. *JAMA*, 333(12), 1028-1029.

¹² Gostin, L. O., Meier, B. M., & Pace, L. (2025). A world without WHO—a crossroads for US global health leadership. *JAMA*, 333(12), 1028-1029.

¹³ Rds, "Donald Trump Menang Pilpres AS 2024," CNN Indonesia, 06 November 2024, diakses pada 23 Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241106132601-134-1163573/donald-trump-menang-pilpres-as-2024>

¹⁴ Rds, "Donald Trump Menang Pilpres AS 2024," CNN Indonesia, 06 November 2024, diakses pada 23 Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241106132601-134-1163573/donald-trump-menang-pilpres-as-2024>

memberikan respon untuk memerangi Covid-19 serta menjadi pemimpin dalam keamanan kesehatan global telah dicabut.¹⁵

Anggota parlemen yang mendukung keputusan presiden ini notabeneanya berasal dari partai Republik, bahkan atas desakan mereka RUU WHO Withdrawal Act (H.R. 54) diajukan sebagai langkah resmi penarikan Amerika Serikat dari WHO menurut konstitusi yang ada.¹⁶ Pada dasarnya RUU ini memuat tiga pokok bagian. Pertama, arahan bagi presiden untuk menarik diri dari WHO dan sebagai landasan hukum untuk menarik keanggotaan secara resmi, tanpa adanya RUU ini penarikan yang dilakukan secara sepihak oleh presiden masih bersifat ilegal dan oleh karena perlu persetujuan kongres.¹⁷ Kedua, larangan penggunaan dana federal/pemerintah untuk mendanai WHO.¹⁸ Ketiga, mengenai pencabutan Resolusi bersama (*joint resolution*) yang telah disahkan kongres di tahun 1948.¹⁹ *Joint resolution* 1948 merupakan langkah awal bergabungnya Amerika Serikat secara resmi di WHO dengan persetujuan kongres. Keputusan Trump yang didukung oleh parlemen Amerika Serikat serta persetujuan kongres tersebut sangatlah disayangkan berbagai pihak khususnya bagi WHO.

¹⁵ “Withdrawing the United States from the World Health Organization”, the White House, diakses pada 5 September 2025 <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/withdrawing-the-united-states-from-the-worldhealth-organization/>

¹⁶ “H.R.54WHO Withdrawal Act”, Congress.gov, diakses pada 9 September 2025, <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/54>

¹⁷ WHO Withdrawal Act 2025, H.R. 54, 119th Congress (2025-2026)

¹⁸ WHO Withdrawal Act 2025, H.R. 54, 119th Congress (2025-2026)

¹⁹ WHO Withdrawal Act 2025, H.R. 54, 119th Congress (2025-2026)

1.2 Rumusan Masalah

Sejak Awal berdiri hingga penarikan dari WHO, Amerika Serikat sudah memainkan perannya sebagai aktor utama di WHO baik dalam bentuk bantuan finansial maupun dalam bentuk kontribusi tenaga kesehatan. Sejak tahun 2022 hingga 2023 bantuan dari Amerika Serikat mencapai US\$1,284. Hal ini menunjukkan sikap konsisten dan loyalitas Amerika Serikat terhadap organisasi internasional. Dampak positif dari kerjasama Amerika Serikat dengan WHO seperti keberhasilan program PEPFAR dan GHI juga menjadi instrumen kesehatan global serta kepentingan nasional bagi Amerika Serikat. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tetap saja memilih untuk meninggalkan WHO. Berubahnya arah kebijakan Amerika Serikat terhadap WHO pasca pemerintahan Trump menarik untuk diteliti bahwasanya hubungan Amerika Serikat dengan WHO pra-pemerintahan Trump terbilang baik dan sangat menjunjung sikap kolektif. Oleh karena itu terdapat anomali di balik penarikan Amerika Serikat dari WHO. Amerika Serikat justru mengubah arah kebijakannya di saat posisi Amerika Serikat begitu bernilai di WHO.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab peneliti adalah “Apa faktor penarikan keanggotaan Amerika Serikat dari WHO tahun 2025?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor penarikan Amerika Serikat dari WHO.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah literatur dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya kebijakan Amerika Serikat sehingga dapat memperluas pemahaman mengenai kebijakan Amerika Serikat untuk keluar dari WHO.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan khususnya dalam hal kebijakan luar negeri agar dapat mengetahui bagaimana dampak ataupun resiko yang ditimbulkan ketika keluar dari sebuah organisasi internasional ataupun perjanjian internasional.

1.6 Studi Pustaka

Untuk dapat menemukan hasil, peneliti menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Berbagai karya tulis ilmiah dijadikan sebagai acuan bagi peneliti untuk mengungkap anomali dalam penelitian ini. Penghimpunan referensi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan penelitian yang belum ada pada studi sebelumnya namun masih dalam

kasus yang sama. Untuk itu beberapa karya tulis yang peneliti jadikan sebagai rujukan adalah sebagai berikut :

Sumber rujukan pertama yang peneliti gunakan adalah Artikel Jurnal yang berjudul “*Withdrawal of the United States from the WHO How President Trump Is Weakening Public Health*”.²⁰ Artikel jurnal ini ditulis oleh Gavin Yamey dkk. Dan diterbitkan di The New England Journal of Medicine (NEJM). Artikel ini menjelaskan gambaran umum bagaimana kondisi kesehatan dunia kedepannya tanpa dukungan Amerika dan membandingkannya dengan era kerjasama WHO dan Amerika Serikat di awal pembentukan dulu. Keluarnya Amerika dari WHO menimbulkan skala epidemi, pandemi serta resistensi antimikroba yang tinggi, program yang sudah ada maupun akan dibentuk menjadi terhambat bahkan dibatalkan.

Global Polio Eradication Initiative salah satu program WHO yang merasakan dampak hilangnya dukungan Amerika Serikat. Berbeda disaat dukungan penuh yang diberikan Amerika Serikat, berbagai kampanye kesehatan dapat berjalan dengan baik, seperti kerjasama *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) dengan WHO dalam mengontrol dan membasmi Malaria. Keluarnya Amerika dari WHO secara tidak langsung akan menonaktifkan peran peneliti CDC di kerja sama global baik dalam penelitian, strategi penahanan, dan respons terhadap wabah penyakit yang pada akhirnya semakin memperburuk situasi. Dalam isu politik, WHO sudah mulai membuka jalur investasi bagi negara maupun donatur untuk menggantikan bantuan besar yang tidak diberikan lagi oleh Amerika Serikat, WHO terus berjuang melalui dana kontribusi yang

²⁰Yamey, G., & Titanji, B. K. Withdrawal of the United States from the WHO—how President Trump is weakening public health. *New England Journal of Medicine*, 392(15) 2025, 1457-1460.

dinilai oleh negara anggota. Sejalan dengan itu WHO terus bergerak dalam ketidak pastian siapa yang akan mengisi kekosongan tersebut.

Artikel ini secara umum menjabarkan bagaimana implikasi keluarnya Amerika Serikat dari WHO, mulai dari kendala yang akan dihadapi oleh WHO itu sendiri hingga peluang pengganti kekosongan pengaruh yang sudah diberikan Amerika sebelumnya. Artikel ini sangat membantu penulis dalam melihat gambaran umum bagaimana fenomena keluarnya Amerika Serikat dari WHO menjadi ancaman di kesehatan global. Meskipun demikian terdapat perbedaan dengan penelitian dimana artikel ini menjabarkan secara umum kemungkinan yang ada jika Amerika Serikat menarik diri, sedangkan penelitian berfokus pada faktor dari penarikan tersebut.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Feyzabadi Yazdi.,dkk dengan judul *“The United States withdrawal from the World Health Organization: implications and challenges”*.²¹ Artikel ini membahas bagaimana gambaran secara umum konsekuensi keluarnya Amerika Serikat dari WHO pada level domestik dan di level global serta tantangan yang dihadapi oleh WHO dan dunia kesehatan. Bagi domestik Amerika Serikat, keluarnya dari WHO akan memperburuk krisis kesehatan jangka panjang karena tidak adanya kolaborasi internasional, kemudian Amerika Serikat tidak akan lagi mendapat panduan kesehatan dan arahan dari WHO secara langsung, dalam dunia diplomasi hubungan Amerika Serikat dengan negara sekutu yang mengutamakan kerjasama multilateral akan menjadi tegang.

Meskipun demikian keuntungan yang dirasakan Amerika Serikat keluar dari WHO ialah berkurangnya beban finansial untuk kerjasama Internasional dan

²¹Yazdi-Feyzabadi, V., Haghdoost, A. A., McKee, M., Takian, A., Bradley, E., Brugha, R., ... & Karamouzian, M. The United States withdrawal from the World Health Organization: implications and challenges. *International Journal of Health Policy and Management*, 14, (2025) 9086.

dana bisa dialihkan untuk masalah nasional Amerika Serikat. Pada level global keluarnya Amerika Serikat dari WHO merupakan suatu pukulan finansial yang nyata karena Amerika Serikat sudah menjadi sumber utama pendanaan WHO bertahun-tahun, hal demikian jelas terasa bagi negara-negara anggota menengah kebawah yang tengah membangun program kesehatan atas dukungan dari WHO. Selain itu komitmen negara anggota untuk WHO akan dipertanyakan mengingat Amerika Serikat yang memberi kontribusi besar saja dapat keluar dengan mudah apalagi negara yang berkontribusi kecil. Gejolak politik lain timbul dengan hilangnya pengaruh Amerika Serikat di WHO akan muncul hegemoni baru yang menggantikan pengaruh Amerika Serikat tersebut

Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada pola dan fokus pembahasan. Artikel ini berfokus pada konsekuensi secara umum keluarnya Amerika Serikat dari WHO serta pemberian solusi langkah kedepan yang harus direformasi oleh WHO terutama dalam hal finansial, pada penelitian berfokus pada faktor penarikan Amerika Serikat dari WHO, namun terdapat alasan mengapa Amerika Serikat menarik diri dikarenakan masalah finansial sehingga jurnal ini dapat menjadi acuan peneliti dalam melihat faktor penarikan tersebut.

Sumber rujukan yang ketiga adalah artikel jurnal dengan judul "*A World Without WHO—A Crossroads for US Global Health Leadership*".²² yang ditulis oleh Lawrence O. Gostin dkk. Artikel ini menjelaskan isu Penarikan Amerika Serikat dari WHO berdasarkan dasar hukum untuk penarikan di tahun 2020 dan bagaimana konsekuensi jika Amerika Serikat benar-benar menarik diri. Penarikan di tahun 2020 sudah pada tahap pengiriman surat kepada sekretaris jendral

²² Gostin, L. O., Meier, B. M., & Pace, L. (2025). A world without WHO—a crossroads for US global health leadership. *JAMA*, 333(12), 1028-1029.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres. Pemberitahuan untuk penarikan berlaku satu tahun kemudian setelah surat dikirimkan. Namun belum tepat satu tahun Presiden Biden membatalkan penarikan tersebut, sehingga surat yang sudah dikirimkan kepada jendral PBB tidak berlaku.

Pada masa pemerintahan Biden, respon WHO ketika pandemi mengungkap kekurangan yang di dalam keamanan kesehatan global di saat itu. Dengan demikian pada pemerintahan selanjutnya Trump tidak ragu lagi untuk menarik Amerika Serikat keluar dari WHO, Trump menilai perlu adanya pembentukan ulang struktur keamanan kesehatan global ia juga menyoroti peningkatan pengawasan terhadap program darurat kesehatan WHO harus ditingkatkan. Kemudian artikel ini menjelaskan jika Amerika Serikat keluar, Amerika Serikat akan lemah dalam menjaga keamanan kesehatan nasional, wabah akan mudah masuk seperti H5N1 dan menyerang populasi Amerika Serikat. Kurangnya pendanaan dari Amerika Serikat melemahkan WHO yang artinya dunia tanpa WHO sama saja dengan dunia yang rentan dengan penyakit. Melihat kursi pendanaan WHO yang kosong, negara anti Amerika Serikat berlomba-lomba untuk memainkan perannya khususnya negara Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan atau anggota BRICS.

Pada Artikel ini penulis juga mendesak Amerika Serikat untuk mengkaji ulang keputusan penarikan tersebut, dan berharap presiden Trump membuat pilihan pada jendral PBB untuk mereformasi WHO agar menjadi lembaga yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Artikel ini memiliki persamaan dengan penelitian berupa melihat dinamika penarikan Amerika Serikat dari WHO, hanya

saja pada penelitian fokus pada faktor atau alasan dibalik penarikan Amerika Serikat dari WHO.

Sumber rujukan keempat adalah artikel jurnal yang berjudul “*U.S. Withdrawal From the World Health Organization: Unconstitutional and Unhealthy*”.²³ Makalah penelitian ini ditulis oleh Sarah Wetter, ia adalah seorang ahli hukum di institut O’Neill khusus kesehatan untuk nasional dan hukum kesehatan global Universitas Georgetown. Makalah ini menjelaskan keluarnya Amerika Serikat dari WHO merupakan krisis konstitusi Amerika Serikat dan awal dari kemunduran WHO dalam mengatasi isu krusial kesehatan skala global seperti penyakit menular maupun tidak menular. Program WHO dalam memberantas, malaria, HIV/AIDS, tuberkulosis, penanganan nutrisi anak akan terkendala, bahkan kasus polio global yang 99,9% sudah teratasi berpotensi naik kembali menjadi 200.000 kasus dalam satu dekade. Pasalnya Amerika Serikat sudah menjadi pendonor terbesar untuk berbagai program WHO tersebut dengan dana yang dikucurkan mencapai \$450 juta pertahun²⁴. Maka dari itu resiko kesehatan yang jauh lebih besar akan dirasakan oleh masyarakat dunia.

Keluarnya Amerika Serikat dinilai tindakan yang irasional di tengah krisis kesehatan dunia. Pasalnya Donald Trump secara sepihak mengeluarkan kebijakan tersebut dengan demikian sistem konstitusional Amerika Serikat dipertanyakan. Pada sistem konstitusi Amerika Serikat, kongres dan Presiden memiliki kekuasaan yang sama dalam hal sebagai berikut; menyatakan perang, mengatur perdagangan

²³ Wetter, S., & Friedman, E. A. (2020). *US Withdrawal From the World Health Organization: Unconstitutional and Unhealthy*. 2020). *Assessing Legal Responses to COVID-19*. Boston: *Public Health Law Watch*.

²⁴ Wetter, S., & Friedman, E. A. (2020). *US Withdrawal From the World Health Organization: Unconstitutional and Unhealthy*. 2020). *Assessing Legal Responses to COVID-19*. Boston: *Public Health Law Watch*.

luar negeri, mengatur keamanan militer dan angkatan bersenjata, serta berwenang dalam pengangkatan duta besar. Sering menjadi kesalahpahaman ialah kewenangan Presiden untuk mengakhiri sebuah perjanjian secara sepihak berbeda dengan kewenangan Presiden untuk menarik diri secara sepihak dari sebuah organisasi internasional dan pemerintahan asing.

Dengan demikian dalam kasus keluarnya Amerika Serikat dari WHO tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang seharusnya, karena Amerika Serikat keluar dari perjanjian kerjasama yang sudah mengikat 194 negara didalamnya. Kemudian untuk menjelaskan inkonstitusional ini keluarnya Amerika Serikat dari WHO dilihat dari determinan bagaimana proses masuknya Amerika Serikat di tahun 1948 dan haruslah sama atas persetujuan seluruh kongres yang kemudian ditandatangani oleh presiden.

Perbedaan sumber rujukan keempat ini dengan penelitian adalah fokus pembahasan dimana makalah penelitian ini menelusuri kegagalan yang ada pada konstitusi Amerika Serikat dalam proses keluar dari WHO dan resiko yang kemungkinan muncul bagi kesehatan global di masa depan, sementara penelitian berfokus pada apa alasan dibalik penarikan keanggotaan Amerika Serikat dari WHO. Meskipun demikian sumber rujukan ini sangat membantu penulis untuk memahami bagaimana proses keluarnya Amerika Serikat dari WHO serta menjadi penguat bagaimana keluarnya WHO ditahun 2025 haruslah atas persetujuan kongres Amerika Serikat.

Referensi kelima sebagai rujukan bagi peneliti adalah jurnal yang berjudul “Pengaruh Donald Trump Terhadap Hubungan Amerika Serikat dengan WHO

2020 – 2021”.²⁵ Jurnal ini ditulis oleh Fudila Nurul Islami, seorang mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jendral Achmad Yani. Di dalam jurnalnya tersebut ia menjelaskan bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan WHO amatlah baik hingga akhirnya hubungan tersebut menjadi rusak ketika pandemi Covid-19, yang mana pada saat itu kepercayaan pemerintah Amerika Serikat kepada WHO sangatlah skeptis, Amerika Serikat menilai WHO berlaku tidak adil selama penanganan pandemi Covid-19 sedangkan di sisi lain Amerika Serikat sudah mengeluarkan dana yang cukup besar yang artinya Amerika Serikat merasa dirugikan dalam kerja sama ini. Di sisi lain China dengan kontribusi dana yang sedikit malah menjadi fokus utama WHO di saat itu.

Artikel jurnal ini sangat membantu peneliti dalam melihat bagaimana awal dari retaknya hubungan Amerika Serikat dengan WHO, jurnal ini fokus dalam melihat persepsi individu yaitu Trump sebagai pemangku kebijakan yang sudah mengantarkan Amerika Serikat keluar dari WHO dan dilihat dengan sudut pandang konstruktivisme, berbeda dengan penelitian saat ini yang berfokus pada faktor selain individu yang membuat Amerika Serikat keluar dari WHO dengan analisis kebijakan luar negeri.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kebijakan Luar Negeri

Dalam dinamika hubungan internasional suatu negara mempunyai serangkaian prinsip dan strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain negara akan berperilaku sesuai

²⁵ Islami, F. N. (2025). Pengaruh Donald Trump Terhadap hubungan Amerika Serikat dan World Health Organization 2020-2021. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 2(1).

apa yang ingin didapatkan, untuk mencapai hal itu kebijakan luar negeri menjadi arahan dalam bertindak, berperilaku, dan menentukan arah sikap di dunia internasional. Para ahli hubungan internasional klasik memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap definisi kebijakan luar negeri. Menurut Holsti kebijakan luar negeri adalah tindakan resmi yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap lingkungan eksternal dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan kepentingan nasional.²⁶ Secara ringkas menurut Rosenau kebijakan luar negeri adalah seperangkat sikap, keputusan, serta tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap aktor internasional lainnya dalam sistem internasional.²⁷ Di era hubungan internasional kontemporer definisi kebijakan luar negeri sedikit mengarah pada adanya unsur pedoman, ide dan nilai-nilai, dalam melindungi, mempromosikan kepentingan di tengah interaksi antar bangsa, seperti yang didefinisikan oleh Jesmine Ahmed kebijakan luar negeri adalah strategi dan pedoman yang dirumuskan oleh negara untuk menjaga serta mempromosikan kepentingan nasional dalam hubungan dengan negara lain secara bilateral maupun multilateral.²⁸ Sementara itu Faridah Jaafar dan Nurulhasanah kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan negara yang dipengaruhi oleh faktor individu pemimpin, institusi pemerintah, masyarakat, dan sistem

²⁶ Holsti, K. J. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233–309.

²⁷ Rosenau, J. N. (1980). *The scientific study of foreign policy*.

²⁸ Ahmed, J. (2020). The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Critical Reviews*

internasional dalam menentukan hubungan dengan negara lain.²⁹ Defenisi kebijakan luar negeri di era hubungan internasional kontemporer juga dijelaskan Alieu S. Bojang, ia mendefenisikan kebijakan luar negeri adalah pandangan mengenai sesuatu yang ingin dicapai atau seperangkat kepentingan negara ketika berinteraksi dengan negara lain, termasuk dalam hal ide, strategi, sumber daya yang mampu mengarahkan suatu hubungan internasional.³⁰ Setelah memahami defenisi kebijakan luar negeri oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri adalah media yang dipakai oleh aktor-aktor internasional di saat berinteraksi satu sama lain dengan maksud mencapai kepentingan nasional masing-masing aktor maupun untuk kepentingan bersama (global).

1.7.2 Konsep Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Setelah memahami apa itu kebijakan luar negeri maka diperlukan pemahaman mengapa dan bagaimana kebijakan luar negeri diputuskan dan bagaimana suatu kebijakan luar negeri dapat berubah. Disiplin untuk memahami perubahan kebijakan luar negeri dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu konsep analisis kebijakan luar negeri. Menurut Alex Mintz dan Karl Derouen Jr analisis kebijakan luar negeri adalah studi mengenai bagaimana pemimpin dan institusi membuat keputusan dalam konteks internasional yang kompleks. Mereka menekankan analisis dengan

²⁹ Jaafar, F., & Abdul Rahman, N. (2020). Exploring the Fundamentals of Foreign Policy in Malaysia: Definitions, Premiership and Foreign Policy Decisions. *International Journal of Politics, Public Policy and Social Work*.

³⁰ Bojang, A. S. (2018). The study of foreign policy in international relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 6(4), 1-9.

pendekatan modern seperti analisis kognitif pemimpin, teori pengambilan keputusan, dan model birokrasi.³¹

Perubahan kebijakan luar negeri merupakan salah satu fokus penting dalam kajian analisis kebijakan luar negeri. Konsep ini menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu negara mengubah arah, strategi, maupun tujuan kebijakan luar negerinya dalam merespons dinamika lingkungan internasional maupun kondisi domestic. Kebijakan luar negeri suatu negara tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah akibat dinamika internal ataupun eksternal. Charles F. Hermann merupakan salah satu akademisi yang paling sering dijadikan rujukan untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri. Menurut Hermann, *foreign policy change* adalah perubahan yang terjadi pada tujuan, program, atau orientasi kebijakan luar negeri suatu negara.³²

Menurut Hermann, perubahan kebijakan luar negeri terjadi ketika pemerintah suatu negara memutuskan untuk mengalihkan atau memodifikasi arah kebijakan luar negeri yang sebelumnya telah dijalankan. Perubahan ini tidak selalu bersifat radikal, tetapi dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari perubahan kecil cara pelaksanaan kebijakan hingga perubahan mendasar pada orientasi internasional negara tersebut. Dalam artikelnya yang berjudul *Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy*, Hermann menjelaskan

³¹ Mintz, Alex & DeRouen, Karl. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press.

³² Hermann, Charles F., Charles W. Kegley Jr., & James N. Rosenau. 1987. *New Directions in the Study of Foreign Policy*. Boston: Allen & Unwin.

bahwa perubahan kebijakan luar negeri dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipe perubahan.³³ Pertama adalah *adjustment changes*, adalah perubahan yang paling umum dilakukan suatu negara, bagaimana perubahan perbuahan tersebut dilakukan dan tujuannya tidak keluar dari kepentingan awal. Dalam tipe ini, tujuan utama kebijakan luar negeri tetap dipertahankan, namun terdapat penyesuaian dalam tingkat intensitas atau cara implementasi kebijakan tersebut. Misalnya, pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi tingkat tekanan diplomatik, bantuan luar negeri, maupun keterlibatan dalam organisasi internasional tanpa mengubah tujuan dasar kebijakan.

Kedua adalah *program changes*, adalah perubahan kebijakan dengan menggunakan sarana atau metode yang baru tanpa mengubah tujuan awal dari suatu kebijakan. Pada tingkat ini, tujuan kebijakan tetap sama, tetapi pemerintah mengganti strategi atau mekanisme yang digunakan untuk mencapainya. Contohnya adalah perubahan dari pendekatan militer ke pendekatan diplomatik atau kerja sama internasional untuk mencapai tujuan politik tertentu. Ketiga adalah *problem/global changes*, yaitu perubahan yang terjadi pada tujuan utama kebijakan luar negeri itu sendiri, dalam perubahan ini metode dan tujuan awal dari kebijakan diubah, sehingga kebijakan ini levelnya lebih signifikan. Pemerintah mendefinisikan kembali masalah yang dihadapi atau menetapkan tujuan baru yang berbeda dari kebijakan sebelumnya.

³³ Charles F Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3-21

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas dalam kebijakan luar negeri suatu negara.

Keempat adalah *international orientation change*, adalah level perubahan paling ekstrim dalam mengubah kebijakan luar negeri suatu negara, perubahan ini dilakukan dapat mempengaruhi interaksi global, seperti perubahan aliansi, peran dalam lembaga internasional bahkan perubahan ideologi suatu negara demi mencapai tujuannya. Perubahan ini juga dipicu oleh adanya gesekan dengan aktor lain di dunia internasional. *International orientation changes* mencerminkan transformasi dalam orientasi umum suatu negara terhadap sistem internasional, adanya perubahan ideologi politik luar negeri, maupun posisi negara dalam tatanan global. Perubahan jenis ini biasanya terjadi akibat transformasi politik besar, perubahan rezim, atau perubahan signifikan dalam struktur sistem internasional.

Dari keempat level perubahan ini, tiga level terakhir disebut Hermann sebagai *major foreign policy change* karena mengubah semua komponen dalam pembentukan kebijakan seperti metode, tujuan dan arah kebijakan luar negeri. Penelitian ini memakai konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Charles F. Hermann karena menurutnya dari empat level perubahan tersebut, perubahan orientasi internasional relevan dengan penelitian, karena perubahan kebijakan Amerika Serikat untuk menarik diri dari WHO berada pada level *major foreign policy change* dan adanya perubahan yang mempengaruhi interaksi di dunia internasional.

Setelah mengklasifikasikan empat tipe perubahan kebijakan luar negeri, Hermann kemudian menjelaskan faktor pemicu mengapa suatu negara mengubah kebijakan luar negerinya yang kemudian akan dipakai sebagai pisau analisis terhadap fenomena penarikan keanggotaan AS dari WHO. Hermann menjelaskan sumber perubahan berasal dari *leader driven*, *bureaucratic advocacy*, *domestic restructuring* dan *external shock*.³⁴

1. *Leader Driven*

Pemimpin yang ego dan otoriter mampu mengubah arah kebijakan suatu negara karena pribadinya yang tegas. Visi dan misi dari seorang pemimpin tergantung bagaimana cara pandangnya dalam menanggapi fenomena internasional yang terjadi. Hermann berpendapat bahwa perubahan ini sering kali lebih radikal dan menyeluruh dibandingkan jenis perubahan lain karena berasal dari visi individu yang dominan dan berkuasa. Perubahan ini tidak sekadar penyesuaian kecil, melainkan bisa mengubah tujuan, pendekatan, atau bahkan orientasi internasional negara secara total. Hal ini pernah dicontohkan oleh Hermann pada saat keputusan Presiden Anwar Sadat dari Mesir untuk mengunjungi Israel pada tahun 1977. Tindakan yang didorong oleh inisiatif Sadat tersebut mengubah orientasi kebijakan luar negeri Mesir yang awalnya konfrontasi menjadi perdamaian.³⁵

2. *Bureaucratic Advocacy*

³⁴ Charles F Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3-21.

³⁵ Charles F Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3-21.

Merupakan bagian dari pemerintahan yang mendukung visi dan misi dari pemimpinnya. Mereka sering kali sebut sebagai *agent of change* yang memberikan pandangan, pemikiran, serta dukungan kepada pemimpin dalam pengalihan kebijakan luar negeri. *Bureaucratic advocacy* dapat terjadi ketika beberapa kelompok birokrat atau lembaga pemerintah berpendapat bahwa kebijakan luar negeri yang ada sudah tidak lagi efektif atau relevan. Kelompok ini kemudian secara proaktif mendorong dan melobi untuk perubahan kebijakan dari dalam sistem. Perubahan ini sering kali lebih bersifat spesifik dibandingkan perubahan yang didorong oleh pemimpin.³⁶

3. *Domestic restructuring*

Perubahan ini tidak terjadi karena inisiatif satu pemimpin, tetapi karena seluruh sistem politik domestik telah berubah, yang pada akhirnya menuntut reorientasi kebijakan luar negeri agar sejalan dengan realitas politik yang baru. Perubahan dapat dimulai dari koalisi pemerintah, rezim politik, munculnya kelompok kepentingan baru, serta perubahan dalam sentimen publik. Perubahan kebijakan luar negeri juga terjadi akibat dorongan masyarakat di dalam suatu negara. Masyarakat yang mendukung kebijakan pemimpinnya adalah masyarakat yang paham bagaimana keadaan domestik negara dan fenomena internasional. Dengan demikian masyarakat tersebut ikut

³⁶ Charles F Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3-21.

serta sebagai agen perubahan yang mana pandangan mereka turut dipertimbangi.³⁷

4. *External Shock*

Keadaan internasional turut menjadi faktor perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri dapat berubah sebagai bentuk inisiatif suatu negara dalam merespon isu eksternal. Berbeda dari interaksi internasional yang biasa, external shocks adalah kejadian luar biasa yang terjadi dalam waktu lama, seperti krisis global, perang, serangan teroris, atau perubahan besar dalam sistem internasional. Guncangan ini secara langsung mengancam keamanan, ekonomi, atau stabilitas domestik suatu negara. Karena dampaknya yang besar, para pembuat kebijakan tidak memiliki pilihan selain merespons dengan perubahan kebijakan yang substansial.³⁸

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami fenomena tertentu secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian berbasis metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial secara mendetail, terutama pada elemen yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti interaksi manusia, institusi, dan hubungan antar aktor. Secara sederhana, metode kualitatif dalam penelitian ilmu sosial ditujukan untuk menganalisis suatu fenomena sosial yang

³⁷ Charles F Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3-21.

³⁸ Charles F Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *Quarterly* 34, no. 1 (1990): 3-21.

ada di lapangan dengan cara-cara non-kuantitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis faktor keluarnya Amerika Serikat dari WHO.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis analisis-deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “apa” yang mendeskripsikan penyebab atau mengidentifikasi fenomena terjadi. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini nantinya akan memperlihatkan hubungan kausalitas dalam variabel-variabel fenomena yang dianalisis. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis berharap dapat menganalisis apa faktor dibalik keluarnya Amerika Serikat dari WHO.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ditetapkan untuk memastikan ruang lingkup analisis tetap fokus dan terukur penelitian ini berfokus pada faktor yang mendorong Amerika Serikat menarik diri dari. Selain membatasi ruang lingkup penelitian ini juga membatasi periode penelitian yaitu Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini. Tahun 2025 Merupakan tahun dimana upaya untuk kedua kalinya Amerika Serikat keluar dari WHO. Sehingga tahun 2025 menjadi fokus penelitian untuk meneliti fenomena tersebut.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Untuk mampu menjawab pertanyaan penelitian, dibutuhkan adanya unit dan tingkat analisis. Variabel-variabel ditentukan terlebih dahulu oleh penulis yang kemudian akan menjadi objek analisis maupun eksplanasi. Unit analisis atau variable dependen merupakan unit yang perilakunya akan

penulis deskripsikan dalam penelitian, sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang dampaknya berpengaruh terhadap unit analisis yang akan di amati. Dalam penelitian ini kebijakan luar negeri AS yaitu penarikan keanggotaan Amerika Serikat dari WHO sebagai unit analisis, sedangkan untuk unit eksplanasi nya adalah faktor-faktor yang memengaruhi tindakan penarikan dari WHO di tahun 2025. Dalam penelitian terdapat tingkatan interaksi antar aktor untuk mengkaji masalah penelitian, sehingga tingkat analisisnya adalah pendekatan analisis multi-level yang mencakup individu, domestik, dan sistem internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dari sumber-sumber terkait yang relevan. Pada penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang digunakan oleh peneliti adalah pernyataan resmi parlemen Amerika Serikat mengenai penarikan Amerika Serikat dari WHO yaitu web *Congress.gov* dan pernyataan resmi Presiden pada web *The White House*.

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan berbagai sumber utama, seperti artikel jurnal ilmiah dan buku yang relevan. Peneliti juga menggunakan laporan resmi dari berbagai organisasi internasional, termasuk situs resmi WHO (*who.int*). Peneliti juga menggunakan portal berita internasional, BBC, regional LAC, dan CNN. Berbagai sumber ini

memberikan informasi faktual dan terkini untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Untuk memperoleh data yang akurat peneliti menggunakan beberapa *keyword* atau kata kunci seperti *withdrawal*, *WHO*, *foreign policy*, *internasional organization*, *cooperation*, dan *United States*, untuk memperoleh data mengenai penarikan Amerika Serikat dari WHO dapat dilihat dari kata kunci *withdrawal*. Kemudian untuk memperoleh informasi mengenai program WHO dapat diakses dengan kata kunci *WHO/international organization*, selanjutnya data mengenai berbagai program kerjasama Amerika Serikat dengan WHO dapat menggunakan kata kunci *cooperation* dan untuk mengetahui tindakan atau sikap Amerika Serikat terhadap fenomena internasional dapat menggunakan kata kunci *foreign policy*.

1.8.5 Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data merupakan langkah yang dilakukan untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam subunit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri.³⁹

Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis mengenai faktor yang mendorong penarikan keanggotaan Amerika Serikat dari WHO. Peneliti

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006) 17-18

menggunakan konsep “*Perubahan Kebijakan Luar Negeri*” untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti akan menganalisis informasi-informasi yang ditemukan sesuai dengan empat faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, dalam hal ini adalah perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap WHO.

Faktor pertama adalah *Leader Driven*, dimana pada faktor ini peneliti melakukan analisis terhadap pandangan individu pemimpin Amerika Serikat dalam memutuskan perubahan kebijakan luar negerinya terhadap WHO. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap faktor *Bureaucratic Advocacy*, peneliti akan menganalisis mengenai pengaruh badan-badan birokrasi Amerika Serikat yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan Luar Negeri AS terhadap WHO. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai *Domestic Restructuring*, pada faktor ini, peneliti akan mencoba melakukan analisis terhadap faktor seperti sentimen public, koalisi pemerintah, rezim politik, atau munculnya kelompok kepentingan baru mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap WHO. Terakhir pada tahapan *External Shock* peneliti akan melakukan analisis mengenai faktor eksternal seperti fenomena internasional yang akhirnya menjadi salah satu faktor pendorong perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap WHO. Peneliti akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut menggunakan data yang diperoleh dari pidato, hasil wawancara, penelitian terdahulu, maupun dokumen-dokumen penting dari pemerintah AS. Peneliti akan menghubungkan data yang peneliti temukan dengan indikator-indikator

yang ditemukan di dalam konsep yang peneliti pakai dalam penelitian, dan mengambil menyimpulkan penyebab Amerika Serikat mengambil kebijakan penarikan keanggotaanya dari WHO.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab satu, penulis akan menjelaskan mengenai tentang latar belakang dari penelitian yang melihat urgensi penelitian. Kemudian, akan dilanjutkan dengan penjelasan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademis maupun praktis, tinjauan pustaka untuk menghasilkan pembaharuan atau perbandingan dengan penelitian terdahulu, kerangka konseptual untuk membantu menganalisis fenomena penelitian. Bab ini diakhiri dengan metode, jenis, unit dan level penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diakhiri oleh sistematika penulisan.

BAB II Amerika Serikat dan Rezim Kesehatan Global

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana awal dari berdirinya WHO serta hadirnya Amerika Serikat sebagai negara pemberi bantuan terbesar ke WHO. Bagaimana dinamika Kehadiran Amerika Serikat sejak awal berdirinya WHO khususnya pada era kepemimpinan Presiden Amerika Serikat yang mempengaruhi kerja sama internasional di dunia kesehatan.

BAB III Kebijakan penarikan diri Amerika Serikat dari WHO

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan awal muncul kebijakan penarikan Amerika Serikat dari WHO hingga penarikan tersebut benar terealisasikan.

Secara rinci bab ini akan menjelaskan permasalahan yang mulai terjadi di dalam hubungan Amerika Serikat dengan WHO, sehingga kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap organisasi tersebut berubah.

BAB IV Analisis faktor pendorong Amerika Serikat untuk menarik diri dari WHO

Pada bab ini peneliti akan menganalisis fenomena penarikan Amerika Serikat dari WHO dengan kerangka pemikiran Charles Hermann. Kerangka pemikiran Hermann dapat dipakai sebagai pisau analisis mengenai perubahan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Perubahan tersebut disebabkan oleh empat faktor yaitu kemampuan pemimpin, pemerintahan/birokrasi, masyarakat, isu luar negeri.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan ditarik dari latar belakang fenomena hingga analisis fenomena dengan kerangka pemikiran dan hasilnya disimpulkan pada bagian ini.

